

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmad No. 23 (Mal Pelayanan Publik Lantai II) Kota Probolinggo  
Telp. (0335) 428990 Fax. (0335) 430758

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.

Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, baik capaian yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini, masih jauh dari sempurna namun demikian kami selalu berusaha meningkatkan kesempurnaan laporan ini, maka untuk itu diharapkan ada saran dan kritik demi perbaikan laporan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Probolinggo, 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PROBOLINGGO

**DWI HERMANTO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19740429 199302 1 001

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                               | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                 | <b>iii</b> |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....                           | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                            | <b>1</b>   |
| 1.1. Gambaran Umum Organisasi .....                       | 1          |
| 1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi ..... | 6          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                   | <b>7</b>   |
| 2.1. Rencana Strategis .....                              | 7          |
| 2.2. Program dan Kegiatan.....                            | 8          |
| 2.3. Perjanjian Kinerja.....                              | 9          |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                | <b>10</b>  |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....                     | 10         |
| 3.2. Realisasi Anggaran.....                              | 16         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                               | <b>20</b>  |
| 4.1. Kesimpulan.....                                      | 20         |
| 4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja.....      | 21         |
| <b>LAMPIRAN :</b>   |            |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019                          |            |
| 2. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2019               |            |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jumlah dan Jenis Kelamin Karyawan                               | 3       |
| Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Karyawan                                     | 3       |
| Tabel 1.3 Diklat yang Diikuti Karyawan                                    | 3       |
| Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana  | 4       |
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019                                   | 9       |
| Tabel 2.2 Program Kegiatan pada Perjanjian Kinerja                        | 9       |
| Tabel 3.1 Nilai Investasi Tahun 2018 dan Tahun 2019                       | 11      |
| Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019                           | 11      |
| Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018     | 12      |
| Tabel 3.4 Alokasi per Sasaran Pembangunan                                 | 12      |
| Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran                                 | 13      |
| Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                | 13      |
| Tabel 3.7 Analisis Penyebab   | 13      |
| Tabel 3.9 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja | 14      |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2019, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Walikota Probolinggo tidak hanya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tahun ke 5 RENSTRA yang terdapat pada dokumen anggaran dan pelaksanaan kewenangannya sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kota Probolinggo.

Sesuai dengan rencana kerja (RENJA) tahun 2019 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP tahun 2014-2019 telah ditetapkan indikator sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen penetapan kinerja tahun 2019 ditetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2019 sebagai berikut:

### ∞ **Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang Masuk** ∞

Hasil pengukuran kinerja pada indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo tahun 2019 sebagai berikut :

1. Capaian persentase peningkatan nilai realisasi investasi yang masuk pada tahun 2018 mencapai 25,35% dari target yang telah ditetapkan tahun 2019.
2. Pencapaian kinerja tahun 2019 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - g. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal
  - h. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi
  - i. Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perijinan dan non Perijinan
  - j. Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP tahun 2019 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 6.542.630.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.820.955.460,00

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dikukuhkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Walikota Probolinggo melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

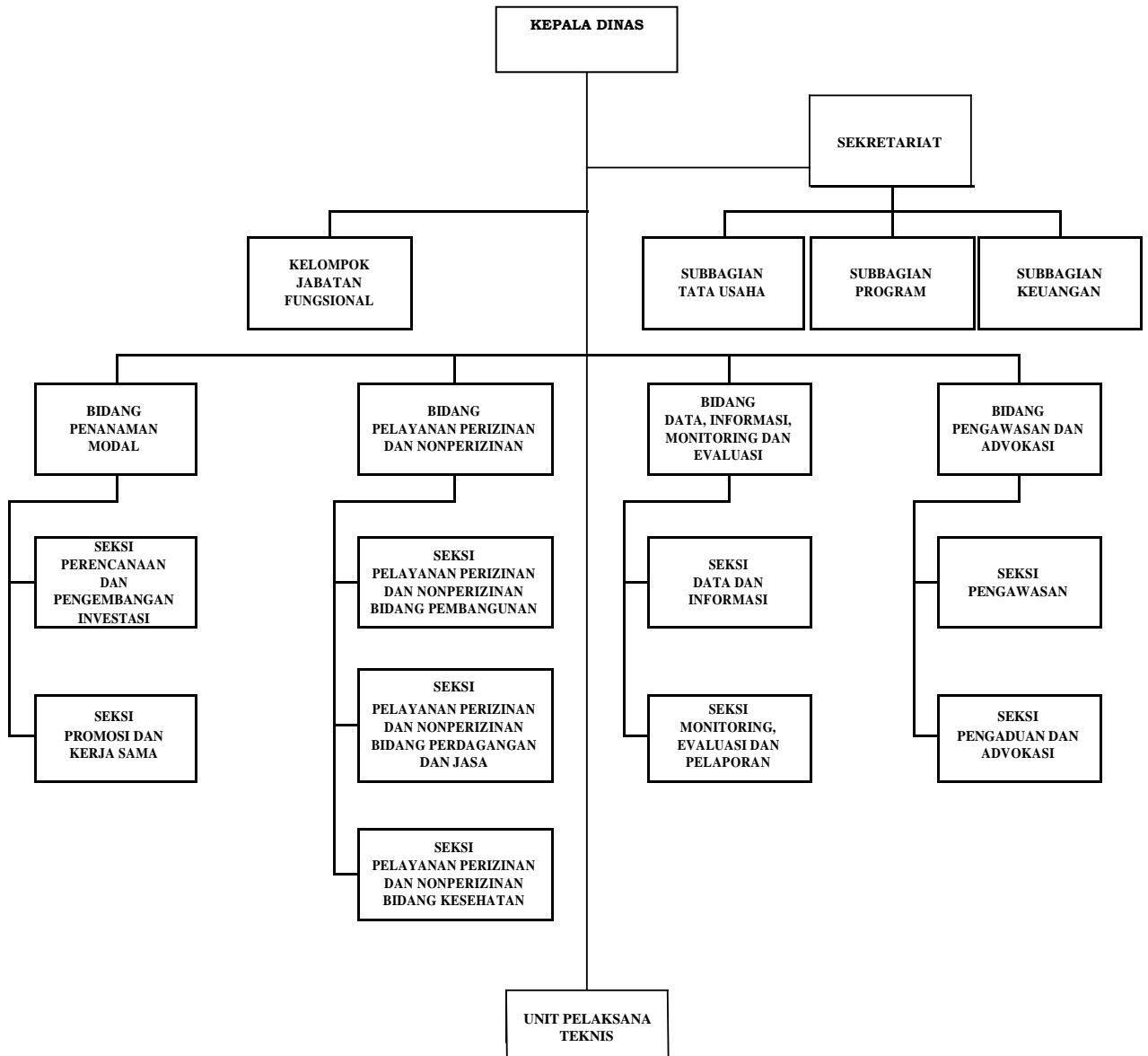
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Program; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
  1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
  2. Seksi Promosi dan Kerja Sama.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
  3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan.

- e. Bidang Data ,Informasi, Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
  1. Seksi Data dan Informasi; dan
  2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang PengawasandanAdvokasi,membawahi:
  1. Seksi Pengawasan; dan
  2. Seksi PengaduandanAdvokasi.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :



## Sumber Daya Manusia Aparatur

Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembaga dapat diketahui sebagai berikut :

### a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo berjumlah 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari:

Tabel 1.1 Jumlah dan Jenis Kelamin Karyawan

| JENIS KELAMIN | PNS       | CPNS     | TENAGA KONTRAK | TENAGA MAGANG | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------|
| Laki-laki     | 12        | 0        | 1              | 7             | 20             |
| Perempuan     | 23        | 0        | 1              | 1             | 25             |
| <b>Jumlah</b> | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>2</b>       | <b>8</b>      | <b>45</b>      |

### b. Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Karyawan

| NO            | TINGKAT PENDIDIKAN  | PNS       | CPNS     | TENAGA KONTRAK | TENAGA MAGANG | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.            | S2                  | 11        | -        | -              | -             | 11             |
| 2.            | S1                  | 9         | -        | -              | 1             | 10             |
| 3.            | Sarjana Muda / DIII | 1         | -        | -              | -             | 1              |
| 4.            | SLTA                | 13        | -        | 2              | 7             | 22             |
| 5.            | SLTP                | 1         | -        | -              | -             | 1              |
| 6.            | SD                  | -         | -        | -              | -             | -              |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>35</b> | <b>-</b> | <b>2</b>       | <b>8</b>      | <b>45</b>      |

### c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

Tabel 1.3 Diklat yang Diikuti Karyawan

| NO            | DIKLAT PIMPINAN     | JUMLAH (ORANG)  |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.            | Diklat Pimpinan III | 2 orang         |
| 2.            | Diklat Pimpinan IV  | 13 orang        |
| 3.            |                     |                 |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>15 orang</b> |



## Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan satu pintu tersebut didukung dengan prasarana dan sarana yang meliputi prasarana fisik dan sarana/aset.

a. Prasarana fisik meliputi :

Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terletak di Jalan Basuki Rahmad No. 23 (Mal Pelayanan Publik Lantai II) Probolinggo dan berfungsi sebagai tempat beraktifitas para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.

b. Sarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo meliputi :

Tabel 1.4 Sarana Prasarana

| <b>NO</b> | <b>Jenis Sarana dan Prasarana</b> | <b>Jumlah/Satuan</b> |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 1.        | Tempat Parkir Roda Dua            | 2                    |
| 2.        | Tempat Parkir Roda Empat          | 1                    |
| 3.        | Ruang Pertemuan                   | 1                    |
| 4.        | Ruang Customer Service            | 1                    |
| 5.        | Ruang arsip                       | 2                    |
| 6.        | Ruang Musholla                    | 1                    |
| 7.        | Gudang                            | 1                    |
| 8.        | Paving Halaman                    | 1                    |
| 9.        | Pagar Gedung                      | 2                    |
| 10.       | Taman Kantor                      | 1 taman              |
| 11.       | Meja Kerja                        | 60 unit              |
| 12.       | Kursi Kerja                       | 63 unit              |
| 13.       | Kursi Rapat                       | 63 unit              |
| 14.       | Lemari Arsip                      | 12 unit              |
| 15.       | Podium                            | 1 unit               |
| 16.       | Almari Buku/kayu                  | 8 unit               |
| 17.       | Lemari Kaca                       | 1 unit               |
| 18.       | Tangga alumunium                  | 1 unit               |
| 19.       | Komputer PC                       | 4 unit               |
| 20.       | Laptop                            | 26 unit              |
| 21.       | Printer                           | 34 unit              |
| 22.       | Kulkas                            | 3 unit               |

| <b>NO</b> | <b>Jenis Sarana dan Prasarana</b> | <b>Jumlah/Satuan</b> |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 23        | Filling Cabinet                   | 4 unit               |
| 24        | AC                                | 31 unit              |
| 25        | Exhause Fan                       | 5 unit               |
| 26        | AC                                | 31 unit              |
| 27        | Exhause Fan                       | 5 unit               |
| 28        | Sofa                              | 3 unit               |
| 29        | Sofa Laktasi                      | 1 unit               |
| 30        | Kursi Tamu                        | -                    |
| 31        | Televisi                          | 6 unit               |
| 32        | Kendaraan roda 2                  | 10 unit              |
| 33        | Kendaraan Roda 4                  | 3 unit               |
| 34        | Acces Point                       | 2 unit               |
| 35        | Apar                              | 1 unit               |
| 36        | Brankas                           | 1 unit               |
| 37        | Camera Digital                    | 2 unit               |
| 38        | Camera + Attachment               | 1 unit               |
| 39        | CCTV                              | 7 unit               |
| 40        | Dispenser                         | 2 unit               |
| 41        | Harddisk                          | 2 unit               |
| 42        | Layar LCD Projector               | 1 unit               |
| 43        | Mesin Fax                         | 1 unit               |
| 44        | Gordyn                            | 15 buah              |
| 45        | Genset                            | 1 unit               |
| 46        | Sound System                      | 2 unit               |
| 47        | Mic Wireles                       | 1 unit               |
| 48        | PABX                              | 1 unit               |
| 49        | Scanner                           | 8 unit               |
| 50        | Server Komputer                   | -                    |
| 51        | Mesin Ketik                       | -                    |
| 52        | Lemari Besi                       | -                    |
| 53        | Pengehancur Kertas                | 1 unit               |
| 54        | Audio Aplifier                    | 1 unit               |
| 55        | Audio Maximizer                   | 1 unit               |
| 56        | Bak Sampah Beroda                 | 1 unit               |

## 2.1 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Instansi

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belum terinventarisasinya potensi dan peluang potensi penanaman modal yang bernilai ekonomi (investasi), dikarenakan data potensi masih kurang akurat dan tidak lengkap hanya sebatas ikon, belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang metode penentuan potensi dan peluang penanaman modal, Internal organisasi SDM dan Anggaran belum memadai;
2. Belum dapat melakukan perhitungan nilai ekonomi potensi dan peluang penanaman modal untuk dapat memunculkan nilai ekonomi untuk ditawarkan kepada investor dalam bentuk prospektus investasi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perizinan yang berbasis online;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik usaha untuk memiliki izin;
5. Kurang optimalnya pengelolaan website;
6. Pengelolaan data perizinan kurang maksimal;
7. SDM Pengelola Keuangan masih kurang memahami terkait aturan-aturan dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan anggaran;
8. Belum memiliki PPBJ;
9. Ada Kasubbag dan Kasubid yang tidak memiliki jabatan pelaksana sehingga kinerjanya tidak optimal;
10. Dengan berlakunya PP 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menyebabkan proses perizinan tidak sesuai dengan SP dan SOP yang ada sehingga diperlukan review lagi terhadap SP/SOP yang selama ini berjalan namun untuk review ini juga membutuhkan waktu yang agak lama karena harus disesuaikan dengan NSPK (norma standar prosedur dan kriteria) masing masing kementerian;
11. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang masih banyak menemui kendala dalam penyelesaiannya dikarenakan lambatnya pertimbangan teknis dari dinas teknis;
12. Sejak diterapkannya PP 24 tahun 2018 setiap investor/ pemohon izin bisa melakukan perizinan berusaha sendiri secara mandiri via online sehingga pihak DPMPTSP tidak memperoleh informasi pemohon dalam hal ini terkait dengan potensi nilai investasi dimana DPMPTSP tidak menerima berkas hardcopi dari pemohon.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2014-2019**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai PD yang terkait langsung dengan fungsi pelayanan perizinan dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang ingin dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus mendukung capaian program yang meliputi ijin yang diterbitkan, nilai investasi, dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kota Probolinggo.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kota Probolinggo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo lima tahun kedepan

Memiliki

- Visi : Terwujudnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan paripurna
- Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan paripurna
- Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dari Sub Sektor Perizinan dan Penanaman Modal
- Sasaran : Meningkatnya nilai penanaman modal dan perizinan;
- Strategi : 1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;  
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;  
3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap izin;  
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

- Kebijakan : 1. Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan;
2. Monitoring dan evaluasi perizinan;
  3. Peningkatan kecepatan pelayanan perizinan;
  4. Pengembangan system informasi perizinan dan penanaman modal;
  5. Pelayanan perizinan secara online;
  6. Penyediaan sarana penyebarluasan informasi;
  7. Promosi potensi dan peluang investasi;
  8. Pengembangan potensi UMKM;
  9. Peningkatan pelayanan prima melalui peningkatan SDM aparatur;
  10. Peningkatan disiplin aparatur;
  11. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan perizinan.

## 2.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2014-2019, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dokumen rencana strategis DPMPTSP tahun 2014-2019, dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Tahun 2019 dan DPA DPMPTSP Tahun 2019. Berikut tabel program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 :

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.I Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| No | Sasaran strategis                                | Indikator Kinerja   | Target |
|----|--|---|--------|
| 1  | 2  | 3   | 4      |
| 1  | Meningkatnya nilai penanaman modal dan perizinan | Persentase peningkatan nilai realisasi investasi yang masuk | 30 %   |

Tabel. 2.2 Program Kegiatan pada Perjanjian Kinerja

| No | Program  | Anggaran             | Ket. |
|----|--|----------------------|------|
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Rp. 1.666.620.400,00 |      |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Rp. 3.209.814.600,00 |      |
| 3  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | Rp. 49.975.000,00    |      |
| 4  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | Rp. 194.400.000,00   |      |
| 5  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   | Rp. 55.000.000,00    |      |
| 6  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  | Rp. 435.125.000,00   |      |
| 7  | Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal   | Rp. 73.150.000,00    |      |
| 8  | Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi   | Rp. 391.025.000,00   |      |
| 9  | Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perijinan dan non Perijinan          | Rp. 347.614.000,00   |      |
| 10 | Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Rp. 119.906.500,00   |      |

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam tahun anggaran 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 1 (satu) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

##### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Persentase pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian untuk mencapai sasaran. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\left\{ \frac{\text{nilai investasi tahun } n - \text{nilai investasi tahun } n^{-1}}{\text{nilai investasi tahun } n^{-1}} \times 100\% \right\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun jumlah realisasi investasi di Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Nilai Investasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

| No | Bidang Usaha   | Tahun 2018  |                          |              | Tahun 2019  |                          |             |
|----|--|-------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|
|    |  | Unit Usaha  | Investasi                | TK           | Unit Usaha  | Investasi                | TK          |
| 1  | Pertanian ( Penggilingan Padi, dll)  | 0           | -                        | 0            | 27          | 474,000,000              | 48          |
| 2  | Peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidayaan sarang burung)                                     | 0           | -                        | 0            | 1           | 91,000,000               | 1           |
| 3  | Perikanan  | 0           | -                        | 0            | 16          | 347,500,000              | 57          |
| 4  | Perkebunan / Kehutanan   | 0           | -                        | 0            | 1           | 1,097,000,000            | 1           |
| 5  | Pertambangan dan Penggalian Gol. C   | 0           | -                        | 0            | -           | -                        | -           |
| 6  | Perindustrian  | 2           | 500,000,000              | 0            | 81          | 67,177,451,400           | 193         |
| 7  | Perdagangan  | 761         | 746,266,613,336          | 9200         | 815         | 962,200,350,000          | 1040        |
| 8  | Perhotelan / Losmen / Penginapan   | 6           | 2,600,000,000            | 5            | 5           | 2,238,314,726,231        | 83          |
| 9  | Restoran / Rumah Makan & Bar / Café  | 45          | 4,317,000,000            | 80           | 1           | 2,000,000,000            | 10          |
| 10 | Gedung Perumahan dan Ruko  | 17          | 16,200,000,000           | 13           | 32          | 30,450,000,000           | 115         |
| 11 | Gedung Perkantoran, Supermarket & Supermall  | 3           | 8,790,610,000            | 3            | 259         | 415,593,951,400          | 971         |
| 12 | Konstruksi Bangunan Sipil  | 77          | 32,544,169,000           | 179          | 182         | 394,717,542,000          | 127         |
| 13 | Pergudangan  | 3           | 4,336,500,000            | 6            | 1           | 26,165,961,164           | 20          |
| 14 | Transportasi darat dan laut  | 7           | 64,700,000,000           | 48           | 6           | 1,627,460,945            | 27          |
| 15 | Kesehatan ( Rumah Sakit Umum, Bersalin Swasta, Apotek, Toko Obat dll )                                     | 8           | 1,407,000,000            | 17           | 394         | 4,892,299,000            | 785         |
| 16 | Koperasi   | 11          | 103,814,408,370          | 93           | 17          | 1,050,000,000            | 29          |
| 17 | Hiburan / Rekreasi ( Usaha Wisata / Travel, Bioskop, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Video Game/Play Station ) | 11          | 1,535,500,000            | 16           | 37          | 1,655,500,000            | 89          |
| 18 | Lain-lain ( Tower / Klinik Kecantikan )  | 117         | 2,705,000,000            | 139          | 17          | 1,889,500,000            | 31          |
| 19 | PMA  | 6           | 2,299,026,791,168        | 2481         |             | 18,560,396,574           |             |
| 20 | PMDN   | 16          | 321,995,809,042          | 11781        |             | 276,379,926,203          |             |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>1090</b> | <b>3,587,509,524,866</b> | <b>24061</b> | <b>1892</b> | <b>4,444,684,564,917</b> | <b>3627</b> |

Dengan demikian berdasarkan rumus capaian kinerja diatas maka, capaian kinerja (performance results) untuk sasaran dan indikator kinerja persentase peningkatan nilai investasi dapat dijelaskan sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase peningkatan nilai realisasi investasi yang masuk | 30 %   | 25,35 %   | 84,5 %  |

Analisis Pencapaian Kinerja :

Pada Tahun 2019 realisasi persentase peningkatan nilai investasi belum tercapai target yang ditetapkan 30% yaitu sebesar 25,35% dengan persentase tingkat capaian sebesar 84,5% .



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | TARGET | REALISASI |       |
|---|--------|-----------|-------|
|   |        | 2018      | 2019  |
| Persentase peningkatan nilai realisasi investasi yang masuk | 30%    | 31,32%    | 84,5% |

Pengukuran realisasi kinerja dilakukan dengan metode perbandingan antara tingkat capaian nilai investasi tahun  $n$  dikurangi nilai investasi  $n^{-1}$  dengan tingkat capaian nilai investasi  $n^{-1}$  untuk mencapai sasaran. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{nilai investasi tahun } n - \text{nilai investasi tahun } n^{-1}}{\text{nilai investasi tahun } n^{-1}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 nilai investasi di Kota Probolinggo meningkat dengan nilai sebesar Rp. **4.444.684.564.917,00** (*empat triliyun empat ratus empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh blas rupiah*) dibandingkan dengan tahun 2018 nilai investasi di Kota Probolinggo sebesar Rp. **3.587.509.524.866,00** (*Tiga triliyun liam ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).

c. Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.4 Alokasi per Sasaran Pembangunan

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | ANGGARAN            | PROSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH |
|---|---------------------|--|
| Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Yang Masuk | Rp. 1.293.670.500,- | 100%   |

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan guna mencapai sasaran pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 1.293.670.500,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Anggaran dialokasikan 100% untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Anggaran tersebut tidak termasuk kegiatan rutin dan sarana prasarana.

d. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | KINERJA |           |         | ANGGARAN         |                 |         |
|---|---------|-----------|---------|------------------|-----------------|---------|
|   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | TARGET           | REALISASI       | CAPAIAN |
| Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Yang Masuk | 30%     | 25,35 %   | 84,5%   | 11.117.079.008,- | 9.055.105.427,- | 81,45%  |

Adapun capaian kinerja persentase peningkatan nilai realisasi investasi yang masuk dari target yang ditentukan sebesar 30%. Dengan realisasi kinerja sebesar 25,35%. Sedangkan capaian anggaran sebesar 81,45% dengan realisasi kinerja Rp. 9.055.105.427,- (Sembilan milyar lima puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

e. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | PROSENTASE CAPAIAN KINERJA | PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Yang Masuk | 84,5%                      | 81,45%                         | 3,6 %             |

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan per unit yang lebih kecil dari target.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7 Analisis Penyebab

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | TARGET | REALISASI | ANALISIS PENYEBAB |
|---|--------|-----------|-------------------|
| Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Yang Masuk | 30%    | 25,35 %   |                   |

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja DPMPSTSP tahun 2019 diperoleh informasi bahwa capaian kinerja DPMPSTSP tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun belum

memenuhi target yang telah ditetapkan nilai realisasi investasi tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi di tahun 2018.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja di tahun 2019 antara lain:

1. Kurang pemahamannya pimpinan perusahaan terhadap LKPM yang disampaikan 3 bulan sekali;
2. Belum adanya tindakan tegas pemberian sanksi dari pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan penanaman Modal;
3. Luas lahan yang tersedia kurang sesuai dengan yang diinginkan investor;
4. Kurangnya mempromosikan hasil daerah seperti pameran yang Pro Investasi (memberikan informasi terkait potensi daerah melalui buku-buku profil, video profil)

Adapun alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan monitoring bagi perusahaan yang belum mempunyai LKPM;
2. Mengadakan pendampingan bagi perusahaan yang belum mempunyai LKPM;
3. Membuat surat Edaran ke perusahaan terkait jangka waktu penyampaian laporan LKPM;
4. Memberikan kemudahan-kemudahan perizinan melalui perizina online, leaflet, booklet;
5. Melakukan kegiatan temu usaha yang ada di kota Probolinggo.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | TARGET | REALISASI | PROGRAM/KEGIATAN  |   |
|---|--------|-----------|---|---|
|   |        |           | PROGRAM   | KEGIATAN  |
| Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Yang Masuk | 30 %   | 25,35%    | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi   | Koordinasi Perncaanaan dan Pengembangan Penanaman Modal   |
|   |        |           |   | Penyelenggaraan Pameran Investasi   |
|   |        |           | Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan | Monitoring Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan<br>Pengelolaan Data Perijinan dan Penanaman Modal |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan | Penanganan Pengaduan<br>Sosialisasi Pelaksanaan ketentuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   |
|  |  |  | Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi               | Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pembangunan<br>Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Perdagangan dan Jasa<br>Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bidang kesehatan  |
|  |  |  | Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal                           | Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi SMM ISO<br>Perencanaan dan Penyusunan Prosedur Operasi Standar/Standard Operating Procedure (SOP)<br>Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Penyusunan Standar Pelayanan  |
|  |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah<br>Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan   |
|  |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Pengadaan Mebeleur<br>Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah |
|  |  |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya<br>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu   |
|  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan  |
|  |  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  |

|  |  |  |                                |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|
|  |  |  | Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Capaian  |
|  |  |  |                                | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) |
|  |  |  |                                | Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD                          |
|  |  |  |                                | Penyusunan Renstra                                     |
|  |  |  |                                | Evaluasi Pelaksanaan Kinerja SKPD                      |

## Penjelasan

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Indikator kinerja utamanya yaitu Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Yang masuk pada tahun 2019 dengan target 30%. Melalui 10 Program dan 33 kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun nilai realisasi investasinya meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar **Rp4.444.684.564.917,00**. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah, melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan dengan adanya Mal Pelayanan Publik dapat menyederhanakan dan mempermudah proses pelayanan perizinan. Selain itu, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui aplikasi OSS yang sudah terintegrasi dengan LKPM online akan meningkatkan kepatuhan para pelaku Usaha/Investor dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya. Upaya lainnya dari Pemerintah maupun pemerintah daerah adalah membenahi dan meningkatkan kondisi infrastruktur sehingga dapat meyakinkan para penanaman modal yang berminat melakukan kegiatan usahanya di Kota Probolinggo.

### 3.2 Realisasi Anggaran

|    | Program                                    | Kegiatan   | Anggaran (Rp)          | Realisasi              | %            |
|----|--|--|------------------------|------------------------|--------------|
| A. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | <b>1.666.620.400,-</b> | <b>1.387.292.104,-</b> | <b>83,24</b> |
|    |  | Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik | 379.410.000,-          | 131.954.075,-          | 34,78        |
|    |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan           | 15.000.000,-           | 14.195.000,-           | 94,63        |
|    |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah     | 597.266.900,-          | 597.241.439,-          | 100          |

|    |   |   |                        |                        |              |
|----|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
|    |   | Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan                             | 674.943.500,-          | 643.901.590            | 95,40        |
| B. | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>3.209.814.600,-</b> | <b>2.063.814.056,-</b> | <b>64,30</b> |
|    |   | Pengadaan Mebeler   | 159.250.000,-          | 156.300.000,-          | 98,15        |
|    |   | Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, alat Studio dan alat komunikasi                 | 2.497.592.600,-        | 1.383.773.949,-        | 55,40        |
|    |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor  | 373.000.000,-          | 372.576.457,-          | 99,89        |
|    |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  | 35.000.000,-           | 34.225.750,-           | 97,79        |
|    |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional                                   | 35.000.000,-           | 33.941.900,-           | 96,98        |
|    |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Alat Rumah Tangga, alat studio dan alat komunikasi | 60.126.000,-           | 42.686.000,-           | 70,99        |
|    |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala taman dan Bangunan lainnya                                     | 27.000.000,-           | 26.929.000,-           | 99,74        |
|    |   | Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 22.846.000,-           | 13.381.000,-           | 58,57        |
| C. | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   | <b>49.975.000,-</b>    | <b>44.875.000,-</b>    | <b>89,79</b> |
|    |   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya   | 34.975.000,-           | 31.375.000,-           | 89,71        |
|    |   | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu   | 15.000.000,-           | 13.500.000,-           | 90,00        |
| D. | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   | <b>194.400.000,-</b>   | <b>181.142.750,-</b>   | <b>93,18</b> |
|    |   | Bimtek  | 194.400.000,-          | 181.142.750,-          | 93,18        |
| E. | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>55.000.000,-</b>    | <b>42.360.000,-</b>    | <b>77,02</b> |
|    |   | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun   | 10.000.000,-           | 9.000.000,-            | 90,00        |
|    |   | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                              | 10.000.000,-           | 5.730.000,-            | 57,30        |
|    |   | Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD   | 10.000.000,-           | 8.200.000,-            | 82,00        |
|    |   | Penyusunan Rencana Strategi   | 10.000.000,-           | 8.500.000,-            | 85,00        |
|    |   | Evaluasi Pelaksanaan Kinerja SKPD   | 15.000.000,-           | 10.930.000,-           | 72,87        |
| F. | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>                            |   | <b>435.125.000,-</b>   | <b>409.834.300,-</b>   | <b>94,19</b> |
|    |   | Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal                                   | 129.230.000,-          | 120.013.800,-          | 92,87        |
|    |   | Penyelenggaraan Pameran investasi   | 305.895.000,-          | 289.820.500,-          | 94,75        |

|    |   |   |                        |                        |              |
|----|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| G. | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal</b>   |   | <b>45.531.000,-</b>    | <b>37.580.500,-</b>    | <b>82,54</b> |
|    |   | Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi SMM ISO                                | 3.700.000,-            | 300.000,-              | 8,11         |
|    |   | Perencanaan dan Penyusunan SOP  | 5.650.000,-            | 0,-                    | 0            |
|    |   | Penyusunan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 56.800.000,-           | 52.502.500,-           | 92,43        |
|    |   | Penyusunan Standar Pelayanan  | 7.000.000,-            | 1.700.000,-            | 24,29        |
| H. | <b>Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi</b>   |   | <b>411.289.500,-</b>   | <b>378.514.000,-</b>   | <b>92,03</b> |
|    |   | Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan          | 165.491.000,-          | 157.225.000,-          | 95,01        |
|    |   | Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa | 129.418.000,-          | 112.036.000,-          | 86,57        |
|    |   | Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan            | 96.116.000,-           | 95.516.000,-           | 99,38        |
| I. | <b>Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perijinan dan non Perijinan</b>          |   | <b>347.614.000,00</b>  | <b>185.768.500,-</b>   | <b>53,44</b> |
|    |   | Monitoring Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan                               | 48.865.000,-           | 48.865.000,-           | 100          |
|    |   | Pengelolaan Data Perijinan dan Penanaman Modal                                | 298.749.000,-          | 136.903.500,-          | 45,83        |
| J. | <b>Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b> |   | <b>119.906.500,00</b>  | <b>86.589.250,-</b>    | <b>72,21</b> |
|    |   | Penanganan Pengaduan  | 66.610.000,-           | 59.019.250,-           | 88,60        |
|    |   | Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  | 53.296.500,-           | 27.570.000,-           | 51,73        |
|    | <b>TOTAL</b>  |   | <b>6.542.630.500,-</b> | <b>4.820.955.460,-</b> | <b>73,69</b> |

## Penjelasan

### 1. Nilai Investasi

Nilai Realisasi Investasi pada Tahun 2019 sebesar **Rp4.444.684.564.917,00** (*empat milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah Sembilan ratus tujuh belas rupiah*) naik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar **Rp. 3.587.509.524.866,00** (*tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan ribu lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) Realisasi investasi berdasarkan LKPM dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang. Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan Iklim Investasi di Kota Probolinggo cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya di Kota Probolinggo.

### 2. Jumlah Ijin yang diterbitkan

Untuk tahun 2019 dari (55 jenis perizinan dan non perizinan) Jumlah izin yang terbit yaitu sebanyak 1.962 sedangkan pada tahun 2018 jumlah izin yang terbit sebanyak 2.581 ini menunjukkan ada penurunan sebesar 24 % dari capaian tahun 2018. Hal ini juga disebabkan beberapa izin yang sudah bisa diakses sendiri oleh masyarakat melalui system Online Single Submission (OSS) seperti misalnya SIUP, TDP, TDUP dan SIUJK.



## **BAB IV PENUTUP**

### **2.1. Kesimpulan**

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kota Probolinggo tahun 2019, dapat diambil kesimpulan bahwa ada peningkatan nilai investasi sebesar 857.175.040.051,- atau 25,35 % dari tahun 2018.

Kemudian berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 terhadap target realisasi kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi kinerja sebesar 80,37 %;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi kinerja sebesar 80,37 %;
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur realisasi kinerja sebesar 80,37%;
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 80,37%;
  - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 80,37%;
  - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi capaian kinerja sebesar 0,57 %;
  - g. Program Peningkatan kualitas dan Kuantitas Pelayanan Penanaman Modal capaian kinerja sebesar 80,37 %;
  - h. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi capaian kinerja sebesar 94,12 %;
  - i. Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, perizinan dan Non Perizinan capaian kinerja sebesar 56,5 %;
  - j. Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan capaian kinerja sebesar 50 %.
2. Hambatan dan permasalahan :
  - a. Program kegiatan untuk belanja kegiatan pada belanja program belum sesuai dengan usulan pada saat perencanaan awal sehingga target kegiatan program menyesuaikan pada anggaran yang tersedia pada akhir tahun anggaran;
  - b. Belum semua pengusaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN. Hal ini mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti serta berpengaruh terhadap pembinaan yang

- harus dilakukan kepada investor PMA/PMDN;
- c. Dengan diterapkannya sistem OSS (Online Single Submission), data dari perkembangan nilai investasi masih sulit dihitung secara akurat dikarenakan data investasi dari sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak tertuang dalam aplikasi OSS tersebut.
  - d. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Probolinggo;
  - e. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
  - f. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP karena kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan ada pada PD pemberi rekomendasi.
  - g. Dengan adanya system Online Single Submission (OSS) masyarakat dengan mudah bisa mengakses dan menerbitkan sendiri izin yang diperlukan. Ini mengakibatkan banyak pelaku usaha dari sector UMKM tidak menyerahkan izin yang terbit /hardcopy kepada pihak DPMPTSP. Akibatnya data tidak tertampung dalam database.

## **2.2. Langkah - Langkah untuk Meningkatkan Kinerja**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2014-2019;
2. Meningkatkan peran Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu sarana untuk mempermudah layanan birokrasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga dapat memberikan citra positif pemerintah kota Probolinggo kepada pihak investor;
3. Membuat Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) yang menggambarkan secara akurat dan jelas mengenai potensi investasi di Kota Probolinggo dalam rangka memberikan wacana yang menarik bagi calon investor;
4. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang izin yang diterbitkan dengan pihak kementerian atau BKPM (berkaitan dengan OSS) dan OPD lain selaku pihak pemberi rekomendasi teknis;

5. Perlu diadakan sosialisasi yang berkesinambungan terkait aplikasi OSS maupun aplikasi perizinan lainnya seperti SI CANTIK CLOUD. Hal ini penting dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi perizinan yang berbasis online;
6. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kecakapan personil pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui Bimbingan teknis serta melakukan penataan personil sesuai dengan potensi dan kompetensinya.